

BAB III

Akuntabilitas Kinerja

III.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran. Pengukuran ini dilaksanakan berdasarkan format Pengukuran Kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu dengan membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2025. Untuk mempermudah interpretasi hasil pencapaian, digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada ketentuan dalam Permendagri Nomor 53 Tahun 2014, sebagaimana disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	Capaian Kinerja > 100%	A
2	Capaian Kinerja = 100%	B
3	80% < Capaian Kinerja < 100%	C
4	50% < capaian kinerja < 80%	D
5	Capaian kinerja < 50%	E

Capaian indikator tujuan Bappeda Kabupaten Gresik ditunjukkan melalui Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Indeks Pelayanan Publik. Berdasarkan penelaahan sasaran pembangunan RPJMD Kabupaten Gresik, tujuan Renstra Bappeda Tahun 2025–2029 dirumuskan sebagai Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas dan Penguatan Riset dan Inovasi, dengan target indikator yang meningkat secara bertahap hingga akhir periode perencanaan sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.2
Tujuan Bappeda Tahun 2025-2030

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	KONDISI AWAL	TARGET INDIKATOR						KONDISI AKHIR
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas dan Penguatan Riset dan Inovasi	Nilai Akuntabilitas Institusi Pemerintah	80,62	80,9	81,2	81,5	81,8	82,1	82,4	82,1
	Indeks Pelayanan Publik	1,66	2,25	2,51	2,75	3,01	3,25	3,51	3,25

Indikator Tujuan Bappeda yang pertama adalah penguatan akuntabilitas dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP oleh MenPAN-RB, Pemerintah Kabupaten Gresik pada Tahun 2018 sampai dengan 2024 berturut turut mendapatkan predikat A.

Tabel 3.3
Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 – 2024

TAHUN	NILAI SAKIP
2020	81,31
2021	80,86
2022	81,59
2023	81,93
2024	80,6
2025	80.6*

(*) Nilai SAKIP Tahun 2025 belum keluar, sehingga sementara menggunakan nilai Tahun 2024

Sumber: Hasil Evaluasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2024

Hasil evaluasi Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya karena berdasarkan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terdapat Perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya. Evaluasi tahun ini lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja baik pada level pemerintah daerah maupun Pemerintah Daerah.

Tabel 3.4
Rincian Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2024

NO	KOMPONEN YANG DINILAI	BOBOT	NILAI
1	Perencanaan Kinerja	30	25,24
2	Pengukuran Kinerja	30	23,72
3	Pelaporan Kinerja	15	13,03
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18,61
Nilai Hasil Evaluasi		100	80,60
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			A

Selain itu, indikator tujuan lainnya adalah Indeks Pelayanan Publik (IPP) yang digunakan untuk mengukur kinerja penyelenggaraan pelayanan publik. Target Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja pelayanan publik Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Gresik memperoleh nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) sebesar 4,35 dari target Tahun 2025 sebesar 2,25, mencerminkan kualitas pelayanan publik yang sangat baik.

Selanjutnya, pengukuran capaian kinerja sasaran strategis Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2025 menggunakan indikator kinerja sasaran yang dirumuskan dalam Renstra Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2021–2026 dan Renstra Tahun 2025–2029. Pengukuran kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditargetkan pada Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026 dan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 melalui 2 (dua) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2025.

Pengukuran capaian kinerja jika dibandingkan dengan target perjanjian kinerja Bappeda berdasarkan Renstra tahun 2021-2026 dan Renstra tahun 2025-2029 tersaji pada Tabel 3.5 dan Tabel 3.6 sebagai berikut:

Tabel 3.5
Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Gresik Renstra Tahun 2021-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2025		CAPAIAN	KATEGORI
			TARGET	REALISASI		
1	Menghadirkan Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan perencanaan pembangunan Daerah	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
2	Mendorong Penguatan Inovasi Daerah untuk Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Inovatif dan Partisipatif	Pertumbuhan Capaian Inovasi Daerah	20,29%	20,48%	100,94%	Sangat Tinggi

Dalam pelaksanaan Renstra Tahun 2021–2026, capaian kinerja sasaran strategis menunjukkan hasil yang optimal. Sasaran strategis Menghadirkan Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah berhasil dicapai secara konsisten dengan realisasi indikator Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar 100 persen pada Tahun 2025. Sementara itu, sasaran strategis Mendorong Penguatan Inovasi Daerah untuk Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Inovatif dan Partisipatif juga menunjukkan kinerja yang melampaui target, dengan capaian Pertumbuhan Inovasi Daerah sebesar 20,48 persen pada Tahun 2025, yang mencerminkan meningkatnya peran inovasi dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan berkelanjutan.

Tabel 3.6
Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Gresik Renstra Tahun 2025-2029

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2025		CAPAIAN	KATEGORI
			TARGET	REALISASI		
1	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	80,50	80,50	100,00%	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan Daerah	Indeks Inovasi Daerah	54,71	57,98	105,98%	Sangat Tinggi

Sasaran strategis Meningkatkan Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam pelaksanaan Renstra Tahun 2021–2026 secara konsisten tercapai sesuai dengan target di tahun 2025 yakni 100%. Sedangkan, sasaran strategis Mendorong Penguatan Inovasi Daerah untuk Mewujudkan

Perencanaan Pembangunan Daerah yang Inovatif dan Partisipatif dengan indikator Pertumbuhan Inovasi Daerah di tahun 2025 tercapai melebihi target dengan capaian 105,98%.

Berdasarkan capaian realisasi indikator sasaran Bappeda Kabupaten Gresik tahun 2025 menunjukkan kinerja sangat baik pada seluruh sasaran strategis Bappeda. Capaian tersebut digunakan sebagai dasar pendukung dalam menganalisis indikator-indikator pembangunan daerah. Selanjutnya disajikan data indikator pembangunan daerah di Bappeda Kabupaten Gresik, yang memiliki keterkaitan dan relevansi dalam memberikan gambaran komprehensif terhadap capaian pembangunan daerah Kabupaten Gresik. Berdasarkan target RPJMD Tahun 2021–2026, kinerja pembangunan daerah pada tahun 2025 menunjukkan capaian yang relatif baik pada beberapa indikator utama. Diantaranya adalah Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur ditargetkan sebesar 74,00 dan berhasil direalisasikan sebesar 89,71 pada Tahun 2024. Sedangkan, nilai Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Tahun 2025 masih dalam proses penyusunan. Capaian ini didukung oleh komitmen Pemerintah Daerah dalam peningkatan kualitas layanan, peningkatan koordinasi antar Perangkat Daerah, serta meningkatnya partisipasi dan aspirasi masyarakat.

Pada Tahun 2025, Indeks Williamson yang merepresentasikan tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah ditargetkan sebesar 0,43. Penetapan target ini didasarkan pada hasil analisis tren perkembangan ketimpangan dalam beberapa tahun terakhir serta mempertimbangkan dinamika pertumbuhan ekonomi dan distribusi pembangunan di berbagai kecamatan. Proyeksi nilai tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Gresik berada pada kategori ketimpangan wilayah sedang, yang mengindikasikan masih terdapat perbedaan tingkat kemajuan antarwilayah, namun dalam batas yang terkendali. Kondisi ini mencerminkan bahwa upaya pemerataan pembangunan telah menunjukkan arah yang positif, meskipun tetap diperlukan penguatan intervensi kebijakan, khususnya pada wilayah dengan tingkat perkembangan relatif lebih rendah, guna mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif. Selain itu, Indeks Infrastruktur dan Indeks Konektivitas Wilayah merupakan indikator baru yang mulai dihitung oleh Bappeda dalam dokumen RPJMD Tahun 2025–2029. Untuk Tahun 2025, target Indeks Infrastruktur ditetapkan sebesar 63,23, sedangkan Indeks Konektivitas Wilayah ditargetkan mencapai 0,745. Adapun realisasi kedua indeks tersebut masih dalam proses penyusunan.

Pengukuran capaian kinerja yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya disajikan untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan kinerja perangkat daerah secara berkelanjutan. Perbandingan ini dimaksudkan untuk menilai konsistensi pencapaian target, mengidentifikasi tren peningkatan maupun penurunan kinerja, serta mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan. Hasil capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik disajikan dalam Tabel 3.7 dan Tabel 3.8 sebagaimana berikut:

Tabel 3.7
Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Gresik Renstra Tahun 2021-2026

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	REALISASI					KET
			2021	2022	2023	2024	2025	
1	Menghadirkan Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan perencanaan pembangunan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Mendorong Penguatan Inovasi Daerah untuk Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Inovatif dan Partisipatif	Pertumbuhan Capaian Inovasi Daerah	17,65	27,57	11,29	20,29	20,48	

Tabel 3.8
Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Gresik Renstra Tahun 2025-2029

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	BASELINE 2024	REALISASI 2025	KET
1	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	80,00	80,50	
2	Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	Indeks Inovasi Daerah	54,43	57,98	

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.7 dan Tabel 3.8, secara umum kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik menunjukkan perkembangan yang positif dan relatif konsisten selama periode Renstra. Pada sasaran strategis “Menghadirkan Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah”, indikator Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah tercatat mencapai 100% secara konsisten sejak tahun 2021 hingga tahun 2025. Capaian ini menunjukkan bahwa proses perencanaan pembangunan daerah telah selaras dengan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan, serta mencerminkan kuatnya koordinasi dan sinkronisasi antar perangkat daerah dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Konsistensi capaian ini juga menegaskan efektivitas sistem perencanaan yang telah terbangun dengan baik.

Sementara itu, pada sasaran strategis “Mendorong Penguatan Inovasi Daerah untuk Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Inovatif dan Partisipatif”, indikator Pertumbuhan Capaian Inovasi Daerah menunjukkan capaian yang fluktuatif selama periode

2021–2025. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2022, namun mengalami penurunan pada tahun 2023, sebelum kembali meningkat pada tahun 2024 dan relatif stabil pada tahun 2025. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pengembangan inovasi daerah telah berjalan, namun masih dipengaruhi oleh dinamika kapasitas perangkat daerah, keberlanjutan inovasi, serta tingkat partisipasi pemangku kepentingan.

Selanjutnya, berdasarkan Tabel 3.8, pengukuran kinerja tahun 2025 dibandingkan dengan baseline tahun 2024 menunjukkan adanya peningkatan capaian pada seluruh indikator. Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah meningkat dari 80,00 pada tahun 2024 menjadi 80,50 pada tahun 2025, yang mencerminkan perbaikan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, Indeks Inovasi Daerah juga mengalami peningkatan dari 54,43 menjadi 57,98, menunjukkan adanya penguatan peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah.

Pengukuran capaian kinerja yang dibandingkan dengan target akhir Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik disajikan dalam Tabel 3.9 dan 3.10 berikut:

Tabel 3.9
Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Akhir Rencana Strategi
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Gresik Renstra Tahun 2021-2026

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	REALISASI 2025	KATEGORI
1	Menghadirkan Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan perencanaan pembangunan Daerah	100%	100%	
2	Mendorong Penguatan Inovasi Daerah untuk Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Inovatif dan Partisipatif	Pertumbuhan Capaian Inovasi Daerah	20,00	20,48	

Tabel 3.10
Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Akhir Rencana Strategi
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Gresik Renstra Tahun 2025-2029

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	REALISASI 2025	KATEGORI
1	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	82,50	80,50	

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	REALISASI 2025	KATEGORI
2	Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	Indeks Inovasi Daerah	59,13	57,98	

Berdasarkan pengukuran capaian kinerja terhadap target akhir Renstra Tahun 2021–2026 pada Tabel 3.9 dan Renstra Tahun 2025–2029 pada Tabel 3.10, secara umum kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik menunjukkan capaian yang positif dan berada pada jalur pencapaian target. Indikator Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah telah mencapai 100% pada tahun 2025, sesuai dengan target akhir Renstra, sehingga sasaran ini dinilai telah tercapai. Selanjutnya, indikator Pertumbuhan Capaian Inovasi Daerah mencapai 20,48, telah melampaui target akhir Renstra sebesar 20,00, menunjukkan keberhasilan penguatan inovasi daerah. Sementara itu, indikator Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah dan Indeks Inovasi Daerah masing-masing mencapai 80,50 dan 57,98, masih berada di bawah target akhir Renstra tahun 2026. Namun demikian, capaian tersebut menunjukkan tren peningkatan dan berada dalam kondisi on track, sehingga diperlukan penguatan dan percepatan pelaksanaan program agar target akhir Renstra dapat tercapai secara optimal.

Selanjutnya, terkait tingkat capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah tahun 2021-2026 dan tahun 2025-2029 dibandingkan dengan rata-rata capaian Nasional dan Provinsi Jawa Timur ditunjukkan pada Tabel 3.11 dan Tabel 3.12 sebagai berikut:

Tabel 3.11
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional/Provinsi Jatim
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Gresik Renstra Tahun 2021-2026

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	NASIONAL	PROV. JATIM	PERANGKAT DAERAH	Lebih Rendah/ Lebih Tinggi
1	Menghadirkan Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan perencanaan pembangunan Daerah	98,82%	100,00%	100,00%	
2	Mendorong Penguatan Inovasi Daerah untuk Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Inovatif dan Partisipatif	Pertumbuhan Capaian Inovasi Daerah	-	-	20,48 (100 inovasi)	

Tabel 3.12
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional/Provinsi Jatim
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Gresik Renstra Tahun 2025-2029

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	NASIONAL	PROV. JATIM	PERANGKAT DAERAH	Lebih Rendah/ Lebih Tinggi
1	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	80,50	
2	Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	Indeks Inovasi Daerah	-	90,84	57,98	

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja renstra pada tahun 2021-2026, Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah pada tingkat nasional mencapai 98,82%, sedangkan pada tingkat Provinsi Jawa Timur sebesar 100,00%. Adapun capaian Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik juga telah mencapai 100,00%, sejajar dengan capaian Provinsi Jawa Timur dan lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Gresik telah berada pada kondisi optimal, sehingga ke depan fokus pembangunan dapat diarahkan pada peningkatan kualitas implementasi program dan kegiatan pembangunan serta penguatan inovasi daerah guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Sedangkan indikator Pertumbuhan Capaian Inovasi Daerah yang dikelola Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik tercatat sebesar 20,48. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengembangan inovasi daerah di Kabupaten Gresik telah mulai berjalan, namun masih memerlukan penguatan dan percepatan agar dapat mendekati capaian provinsi, khususnya melalui peningkatan koordinasi lintas perangkat daerah, kualitas inovasi, serta penguatan sistem pendataan dan pelaporan inovasi daerah.

Pada Renstra Tahun 2025–2029, indikator yang digunakan adalah Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gresik sebesar 80,50. Capaian tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah telah berjalan, namun masih terdapat ruang perbaikan dalam rangka penyempurnaan kualitas dan konsistensi perencanaan, seiring dengan proses penyesuaian kebijakan dan penguatan koordinasi lintas perangkat daerah. Sedangkan, Capaian Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Gresik tercatat sebesar 57,98, sementara data pada tingkat nasional belum

tersedia dan Indeks Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur mencapai 90,84. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pengembangan inovasi daerah di Kabupaten Gresik telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun masih memerlukan penguatan dan penyempurnaan secara berkelanjutan agar capaian inovasi daerah dapat terus meningkat dan selaras dengan arah kebijakan serta capaian di tingkat provinsi.

Sejalan dengan capaian Indeks Inovasi Daerah, upaya penguatan inovasi tersebut menjadi faktor penting dalam mendorong peningkatan Indeks Daya Saing Daerah sebagai indikator kemampuan daerah dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Gresik Tahun 2025 terealisasi sebesar 3,76, atau melampaui target yang ditetapkan sebesar 3,75. Faktor penunjang keberhasilan IDSD tersebut meliputi struktur ekonomi industri yang kuat dan terdiversifikasi tercermin pada Kabupaten Gresik yang memiliki basis industri manufaktur, petrokimia, semen, dan logistik yang matang, sehingga memberikan kontribusi besar terhadap efisiensi pasar, produktivitas tenaga kerja, dan nilai tambah ekonomi. Selain itu, kapasitas kelembagaan pemerintah daerah yang meliputi perbaikan tata kelola pemerintahan, perencanaan berbasis data, serta sinergi lintas perangkat daerah turut mendukung efektivitas kebijakan peningkatan daya saing. Serta, dukungan infrastruktur dasar dan infrastruktur industri melalui ketersediaan infrastruktur energi, air industri, dan kawasan terintegrasi menjadi faktor penopang utama dalam meningkatkan efisiensi produksi dan daya tarik investasi. Jika dibandingkan dengan realisasi IDSD Provinsi Jawa Timur dengan nilai realisasi 3,91 Kabupaten Gresik masih berada dibawah Jawa Timur namun lebih tinggi dibandingkan realisasi Nasional dengan nilai realisasi sebesar 3,50.

Pada Tahun 2025, Pertumbuhan Inovasi Daerah telah melahirkan 100 Inovasi dan telah didaftarkan ke dalam *Innovative Government Award* dan meraih penghargaan peringkat ke-119 dari 415 Kabupaten di Indonesia oleh Kementrian Menteri Dalam Negeri dengan kategori inovatif.

Tabel 3.13
Daftar 100 Inovasi Kabupaten Gresik Tahun 2025

NO	JUDUL INOVASI	BENTUK INOVASI	URUSAN UTAMA
1	Sistem Elektronik Pelayanan Kelitbangan dan iNovasi Daerah (SEPEKAN) (Fitur Kuota Magang & Monitoring Digital Magang)	Inovasi pelayanan publik	Penelitian dan Pengembangan
2	Sistem Informasi Pengukuran dan Analisa Tunjangan Aparatur Sipil (SI-PANTAS)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Kepegawaian
3	E-ROOTS	Inovasi pelayanan publik	pendidikan
4	SICENTING BERKISAH " ATASI DAN CEGAH STUNTING BERSAMA KITA BISAH"	Inovasi pelayanan publik	kesehatan
5	LASKAR SEHATI	Inovasi pelayanan publik	kesehatan

NO	JUDUL INOVASI	BENTUK INOVASI	URUSAN UTAMA
6	GESIT P-5 SPENDALAS	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	pendidikan
7	KRINGAT WANGI BU RESTI (Kring Pengingat Waktu pendampingan ibu hamil RESTI)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	kesehatan
8	Sistem Elektronik Logistik dan Peralatan Kebencanaan (SELOP)	Inovasi pelayanan publik	ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
9	MEMAYU HAYUNING BAWANA	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	pendidikan
10	Kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan melalui Penyedotan Kakus untuk Dasawisma secara Kolektif, Aman dan Kontinyu (KAMPUNG PUDAK AYU)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	kesehatan
11	Bantuan Untuk Pemberdayaan Perempuan Usaha dan Pendidikan Anak (BUNDA PUSPA)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
12	GERCEP DIGILING (Gerak Cepat Identitas Kependudukan Digital)	Inovasi pelayanan publik	administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
13	GEMA REMATING	Inovasi pelayanan publik	kesehatan
14	SiAbDiS (Sistem Absensi Digital Siswa)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	pendidikan
15	TTM-an (Trotoar Tertib Masyarakat Nyaman)	Inovasi pelayanan publik	ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
16	IBUNDA MANIS	Inovasi pelayanan publik	kesehatan
17	SIPATU GT (Sistem Informasi Pariwisata Terpadu Gresik Tourism)	Inovasi pelayanan publik	pariwisata
18	KUDAKU TENAR (Aku Datang Alat Ukur Tepat dan Benar)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	koperasi, usaha kecil, dan menengah
19	Aplikasi Digitalisasi Pembelajaran (SI DILAN)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	pendidikan
20	GKMS (Gresik Kawasan Merdeka Sampah)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	lingkungan hidup
21	Sistem Informasi Buku Tamu (SIBUKTA)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
22	GALERI APIP	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

NO	JUDUL INOVASI	BENTUK INOVASI	URUSAN UTAMA
23	RUMAH INDADESA (Rumah Pelayanan kecamatan untuk Kerjasama Investasi Desa dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa) di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	pemberdayaan masyarakat dan Desa
24	SIBESTIE (Sistem Informasi Berbasis Digital Terintegrasi) Berbasis Android	Inovasi pelayanan publik	pendidikan
25	SEMPOL (Sistem Mobile Pelayanan PBB Online)	Inovasi pelayanan publik	pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
26	MAS DUDA RINDU BERAT (Masyarakat Dukung Periksa Dahak, Respek, Informasi dan edukasi Berantas TBC)	Inovasi pelayanan publik	kesehatan
27	Berliterasi Pesona dan Keajaiban Legenda Kebomas Melalui Mata Komik PENA (Platform Epik Novel dan Aneka cerita)	Inovasi pelayanan publik	pendidikan
28	SI CARI BERGIZI	Inovasi pelayanan publik	kesehatan
29	ForPeKa Gresik 2.0	Inovasi pelayanan publik	ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
30	Sekardadu (SElasi KegiatAn peRapihan kabel uDAra terpaDU)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	pekerjaan umum dan penataan ruang
31	SEMUT MERAH KERSO (Semangat Mengolah Sampah dengan Kerjasama antar Deso)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	lingkungan hidup
32	CANTIK JELITA	Inovasi pelayanan publik	kesehatan
33	BLUE PRINT PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	pemberdayaan masyarakat dan Desa
34	Service On Saturday di Kecamatan Kebomas (SOS MAS)	Inovasi pelayanan publik	administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
35	SIAP KIR (Integrasi Alat Uji Kendaraan Bermotor)	Inovasi pelayanan publik	perhubungan
36	JEBOL DIKLANTAS (PENGEMBANGAN) (Jemput Bola Rekam KTP untuk Peserta Didik, Lanjut Usia, Disabilitas dan Penerbitan KIA)	Inovasi pelayanan publik	administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
37	JAMU PENAK MAS (Jam Untuk Pendidikan Anak dan Masyarakat)	Inovasi pelayanan publik	pendidikan
38	SiNOPEL (Notifikasi Pelaporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Berbasis WhatsApp Gateway)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	penanaman modal
39	TAMAN BACA DIGITAL	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	pendidikan
40	GERCEP SATSET MAS (Gerakan Cepat Pengelolaan Satuan Tugas Sedia Setiap Saat Masalah Sampah)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	lingkungan hidup

NO	JUDUL INOVASI	BENTUK INOVASI	URUSAN UTAMA
41	Pemanfaatan Teknologi Artificial Intelligence (Kecerdasan Buatan) dalam Website www.jdih.gresikkab.go.id untuk Pendayagunaan Informasi Produk Hukum di Kabupaten Gresik	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
42	KEBUT LAGI	Inovasi pelayanan publik	Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
43	GREEN HOUSE	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	lingkungan hidup
44	Operasi Penangkapan Ikan berbasis Teknologi (OPITEK)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	kelautan dan perikanan
45	AQUDIG (Aquarium Digital)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	perpustakaan
46	Pemanfaatan POC untuk Budidaya Tanaman mendukung urban farming (POCO'E DIUMBAR)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	pertanian
47	GRESIKERJA	Inovasi pelayanan publik	tenaga kerja
48	Sistem Perlindungan Masyarakat dengan Validasi Data SATLINMAS (SI PERMEN DASI)	Inovasi pelayanan publik	ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
49	PANGKAH RUNNING	Inovasi pelayanan publik	Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
50	SIKUe DeSi	Inovasi pelayanan publik	administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
51	BEKALKU (Permakanan Bagi Lansia Kurang Mampu)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	sosial
52	PEPES PEDES (Pendidikan Pengelolaan Sampah untuk Peserta Didik Sd)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	pendidikan
53	Sistem informasi rEkomendasi PERijinan layanan Kelitbangan dengan digitAl sigNature (SEPEKAN) (Data Inovasi Daerah)	Inovasi pelayanan publik	Penelitian dan Pengembangan
54	GEMARZI (GERAKAN MASYARAKAT SADAR GIZI PEDULI STUNTING)	Inovasi pelayanan publik	kesehatan
55	TOP LANTUS (LAYANAN TANPA PUTUS)	Inovasi pelayanan publik	kesehatan
56	GEREBEK PASAR PON	Inovasi pelayanan publik	kesehatan
57	RATU PENSIL IMUT	Inovasi pelayanan publik	kesehatan
58	GODOK	Inovasi pelayanan publik	kesehatan
59	PINTER PTM	Inovasi pelayanan publik	kesehatan

NO	JUDUL INOVASI	BENTUK INOVASI	URUSAN UTAMA
60	SINOPSIS (Sistem Informasi Poin Pelanggaran Siswa)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	pendidikan
61	Perpustakaan Digital 33 Gresik (PUSTAL 33 G)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	pendidikan
62	“WALI SOMAD BERSERBAN” Warung Balita Sehat: Optimalisasi Dana Berbasis Entrepreneur dari sharing bantuan CSR	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	kesehatan
63	KENCENG KAWAL SPJ (Kecamatan Panceng Kawal SPJ)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	pemberdayaan masyarakat dan Desa
64	SIGAP-RTLH (Sistem Informasi Program Pendataan Rumah Tidak Layak Huni)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	perumahan rakyat dan kawasan permukiman
65	Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	pemberdayaan masyarakat dan Desa
66	PALING TAJIR LO	Inovasi pelayanan publik	ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
67	YOOK TILIK BAYI	Inovasi pelayanan publik	kesehatan
68	MATGOMBES (CAMAT GOWES SAMBANG DESA)	Inovasi pelayanan publik	sosial
69	CETINGAN PAPA KEPO	Inovasi pelayanan publik	kesehatan
70	POEDAK (Pelayanan Online Pendaftaran Administrasi Kependudukan)	Inovasi pelayanan publik	administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
71	LAPAK KURMA SI MAS (LAYANAN PEREKAMAN KUNJUNGAN RUMAH DAN SISWA MADRASAH ATAU SEKOLAH)	Inovasi pelayanan publik	administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
72	GERDA CANVIK IVA	Inovasi pelayanan publik	kesehatan
73	JELITA TB	Inovasi pelayanan publik	kesehatan
74	BESTHI (BEROBAT SEHAT SAHABAT TB-HIV)	Inovasi pelayanan publik	kesehatan
75	Jawara Papa Dedi Menusuk Hati	Inovasi pelayanan publik	kesehatan
76	PEMBERDAYAAN SISWA TERHADAP PELESTARIAN BUDAYA LOKAL DI UPT SMPN 27 GRESIK. BERUPA KARYA MUSIK TRADISIONAL BERJUDUL "SANG JUANG"	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	pendidikan
77	B_T DARING	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	pendidikan
78	AKSI PEMANTOLOGI	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	pendidikan
79	SEPAKET (Sistem Pengambilan Keputusan)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	komunikasi dan informatika

NO	JUDUL INOVASI	BENTUK INOVASI	URUSAN UTAMA
80	GORENG CEKATAN (Gobyos Bareng dan Cek Kesehatan)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
81	e-asmara	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	komunikasi dan informatika
82	SPENSEGRES SEHAT GESIT (UPT SMPN 11 GRESIK SEKOLAH SEHAT GENERASI HEBAT)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	pendidikan
83	Lontar Ceri (Layanan Online Kesesuaian Tata Ruang dengan Cepat,Efektif dan Terintegrasi)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	pekerjaan umum dan penataan ruang
84	LADIKA (Laporan Digital Perkembangan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	pendidikan
85	PERSADIVA (PERempuan SAdar DIri akan IVA)	Inovasi pelayanan publik	kesehatan
86	PKH INKLUSIF	Inovasi pelayanan publik	sosial
87	Bina Industri Ramah Lingkungan (BRILIAN)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	lingkungan hidup
88	JULIT KREASI (Jurnal Literasi & Kreatifitas Siswa)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	pendidikan
89	IMPRIS (Implementasi Pembentukan Karakter islami Dengan Tahfidzul Qur'an)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	pendidikan
90	GF Metagabe (Pemetaan Gaya Belajar Melalui Google Form)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	pendidikan
91	Pembelajaran Difrensiasi _Diffrent For KeMaKre	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	pendidikan
92	MBAK JUM (Membuat Batik Jumputan)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	pendidikan
93	Jalin Orientasi Sayang Siswa dan Silaturahmi bersama Masyarakat (JOSSMAS)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
94	KANG RAMLI (Kampung Ramah Lingkungan)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	lingkungan hidup
95	Barcode Masa Depan	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	pendidikan
96	SI DESI MLAKU KEBAT	Inovasi Pelayanan Publik	Kesehatan
97	IMPRIS (Implementasi Pembentukan Karakter islami Dengan Tahfidzul Qur'an)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Pendidikan

NO	JUDUL INOVASI	BENTUK INOVASI	URUSAN UTAMA
98	META URC (PEMETAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL UNIT REAKSI CEPAT)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Tenaga Kerja
99	Edukasi Kesehatan Lingkungan Melalui Klinik Sanitasi (ES LILIN)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Kesehatan
100	DETAH KERIS (Deteksi, Tanggulasi, Kurangi Keluarga Risiko Stunting)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Selanjutnya terkait analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian kinerja Bappeda Kabupaten Gresik beserta solusinya dapat dilihat pada tabel 3.14 dan 3.15 berikut:

Tabel 3.14
Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Gresik Renstra Tahun 2021-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	ANALISIS KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	SOLUSI
1	Menghadirkan keselarasan perencanaan pembangunan daerah		Persentase keselarasan perencanaan pembangunan Daerah	100%	Prioritas pembangunan tahunan telah selaras dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD, serta terwujudnya keterpaduan program dan kegiatan antar perangkat daerah sesuai dengan arah kebijakan RPJMD.	-
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	1. Koordinasi antar perangkat daerah berjalan efektif. 2. Adanya monitoring pelaksanaan kegiatan secara berkala.	-
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	1. Pemahaman perangkat daerah terhadap sistem perencanaan dan evaluasi kinerja cukup baik 2. Adanya pendampingan dan koordinasi yang intensif	-

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN	SOLUSI
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	100%	1. Ketepatan proses administrasi keuangan dan kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan keuangan daerah 2. Adanya koordinasi yang baik dengan pihak terkait	-
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Administrasi Perangkat Daerah	100%	1. Ketersediaan sarana dan prasarana administrasi yang memadai 2. Perencanaan kebutuhan yang tepat 3. Dukungan SDM administrasi yang kompeten 4. Pengelolaan administrasi yang tertib dan berkelanjutan.	-
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	1. Proses pengadaan sesuai waktu yang direncanakan 2. Ketersediaan penyedia jasa yang memenuhi standar	-
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	1. Perencanaan pemeliharaan yang terjadwal 2. Pengawasan dan evaluasi kondisi barang secara rutin.	-
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan program pembangunan RKPd terhadap RPJMD	100%	Keselarasan program pembangunan RKPd terhadap RPJMD belum sepenuhnya optimal akibat adanya penyesuaian kebijakan dan dinamika prioritas pembangunan daerah dengan peralihan RPJMD yang baru.	1. Penguatan sinkronisasi perencanaan RKPd–RPJMD 2. Peningkatan koordinasi lintas perangkat daerah 3. Pemutakhiran dokumen perencanaan secara berkala.
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Fasilitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	Fasilitas dokumen perencanaan pembangunan daerah belum sepenuhnya tercapai karena perbedaan jadwal penyampaian dokumen dan keterbatasan kelengkapan data pendukung.	1. Penyeragaman jadwal penyusunan dokumen 2. Penguatan pendampingan teknis kepada perangkat daerah 3. Peningkatan kualitas dan kelengkapan data perencanaan.

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	ANALISIS KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	SOLUSI
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Fasilitas Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	Seluruh fasilitas analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah telah terlaksana sesuai target dan mendukung proses perencanaan berbasis data.	-
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Fasilitas Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	Kegiatan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan dilaksanakan secara konsisten dan tepat waktu sehingga seluruh target kinerja dapat tercapai sesuai perencanaan.	-
		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Persentase Fasilitas Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	100%	Implementasi sistem informasi belum optimal sepenuhnya akibat kendala teknis aplikasi, keterbatasan integrasi sistem, dan adaptasi pengguna.	1. Peningkatan koordinasi dengan pengelola sistem 2. Penguatan kapasitas SDM pengguna 3. Optimalisasi pemanfaatan dan integrasi sistem informasi pendukung.
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Dokumen Renja Kualitas Baik	100%	1. Pelaksanaan tahapan perencanaan, keterpaduan kebijakan lintas sektor, serta penguatan mekanisme koordinasi dan sinkronisasi antar sektor berjalan secara optimal. 2. Seluruh dokumen perencanaan tersusun sesuai standar kualitas dan selaras dengan arah pembangunan daerah.	-
			Persentase Dokumen Renstra Kualitas Baik	100%		
			Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan sektoral	100%		

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	ANALISIS KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	SOLUSI
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia		Pelaksanaan koordinasi perencanaan berjalan efektif melalui forum lintas perangkat daerah sehingga kebijakan dan program bidang pemerintahan serta pembangunan sumber daya manusia diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah.	-
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100%	Pelaksanaan koordinasi lintas perangkat daerah berjalan optimal sehingga program dan kegiatan selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah.	-
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	Koordinasi perencanaan dilaksanakan secara terstruktur dan berkesinambungan sehingga perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan terintegrasi, selaras, dan mendukung pemerataan pembangunan wilayah.	-
2	Mendorong penguatan inovasi daerah untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang inovatif dan partisipatif		Pertumbuhan Inovasi Daerah	100,94%	Adanya penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, meningkatnya partisipasi aparatur dan pemangku kepentingan, serta adanya fasilitasi dan pendampingan inovasi secara berkelanjutan sehingga mendorong terciptanya inovasi yang relevan dan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik.	-
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kelitbangan	100%	Pelayanan kelitbangan yang diberikan sudah memenuhi harapan masyarakat baik dari sisi kualitas, maupun manfaat bagi penyelenggaraan pemerintah serta mendukung pelayanan publik	-
			Capaian Indeks Inovasi Daerah	106,77%		
			Persentase Kajian Penelitian dan Pengembangan yang dilaksanakan	100%		

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	ANALISIS KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	SOLUSI
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Presentasi Fasilitas Penelitian Bidang Sosial dan Kependudukan	100%	1. Dukungan kegiatan di bidang sosial dan kependudukan terlaksana sesuai target. 2. Hasil kegiatan membantu pemerintah memahami kondisi nyata masyarakat.	-
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase fasilitas penelitian bidang ekonomi dan pembangunan	100%	1. Hasil penelitian memberikan gambaran kondisi ekonomi dan pembangunan daerah yang jelas. 2. Dukungan terhadap penelitian ekonomi dan pembangunan sudah efektif dan memberi manfaat bagi daerah.	-
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang didiseminasikan	100%	1. Hasil kelitbangan memberikan kontribusi nyata bagi kualitas perencanaan pembangunan daerah. 2. Fungsi penelitian dan pengembangan berjalan lengkap, mulai dari penyusunan kajian sampai pemanfaatannya.	-

Tabel 3.15
Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Gresik Renstra Tahun 2025-2029

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	ANALISIS KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	SOLUSI
1	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah		Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	Prioritas pembangunan tahunan telah selaras dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD, serta terwujudnya keterpaduan program dan kegiatan antar perangkat daerah sesuai dengan arah kebijakan RPJMD.	-
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	1. Koordinasi antar perangkat daerah berjalan efektif. 2. Adanya monitoring pelaksanaan kegiatan secara berkala.	-

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN	SOLUSI
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	Pemahaman perangkat daerah terhadap sistem perencanaan dan evaluasi kinerja cukup baik Adanya pendampingan dan koordinasi yang intensif	-
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	100%	Ketepatan proses administrasi keuangan dan kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan keuangan daerah Adanya koordinasi yang baik dengan pihak terkait	-
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Administrasi Perangkat Daerah	100%	Ketersediaan sarana dan prasarana administrasi yang memadai Perencanaan kebutuhan yang tepat Dukungan SDM administrasi yang kompeten Pengelolaan administrasi yang tertib dan berkelanjutan.	-
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitasi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Proses pengadaan sesuai waktu yang direncanakan Ketersediaan penyedia jasa yang memenuhi standar	-
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Perencanaan pemeliharaan yang terjadwal Pengawasan dan evaluasi kondisi barang secara rutin.	-
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan program pembangunan RKPD terhadap RPJMD	100%	Keselarasan program pembangunan RKPD terhadap RPJMD belum sepenuhnya optimal akibat adanya penyesuaian kebijakan dan dinamika prioritas pembangunan daerah dengan peralihan RPJMD yang baru.	Penguatan sinkronisasi perencanaan RKPD–RPJMD Peningkatan koordinasi lintas perangkat daerah Pemutakhiran dokumen perencanaan secara berkala.

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	ANALISIS KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	SOLUSI
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Fasilitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	Fasilitas dokumen perencanaan pembangunan daerah belum sepenuhnya tercapai karena perbedaan jadwal penyampaian dokumen dan keterbatasan kelengkapan data pendukung.	Penyeragaman jadwal penyusunan dokumen Penguatan pendampingan teknis kepada perangkat daerah Peningkatan kualitas dan kelengkapan data perencanaan.
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Fasilitas Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	Seluruh fasilitas analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah telah terlaksana sesuai target dan mendukung proses perencanaan berbasis data.	-
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Fasilitas Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	Kegiatan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan dilaksanakan secara konsisten dan tepat waktu sehingga seluruh target kinerja dapat tercapai sesuai perencanaan.	-
		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Persentase Fasilitas Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	100%	Implementasi sistem informasi belum optimal sepenuhnya akibat kendala teknis aplikasi, keterbatasan integrasi sistem, dan adaptasi pengguna.	Peningkatan koordinasi dengan pengelola sistem Penguatan kapasitas SDM pengguna Optimalisasi pemanfaatan dan integrasi sistem informasi pendukung.
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Dokumen Renja Kualitas Baik	100%	Pelaksanaan tahapan perencanaan, keterpaduan kebijakan lintas sektor, serta penguatan mekanisme koordinasi dan sinkronisasi antar sektor berjalan secara optimal. Seluruh dokumen perencanaan tersusun sesuai standar kualitas dan selaras dengan arah pembangunan daerah.	-
			Persentase Dokumen Renstra Kualitas Baik	100%		
			Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan sektoral	100%		

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN	SOLUSI
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia		Pelaksanaan koordinasi perencanaan berjalan efektif melalui forum lintas perangkat daerah sehingga kebijakan dan program bidang pemerintahan serta pembangunan sumber daya manusia diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah.	-
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100%	Pelaksanaan koordinasi lintas perangkat daerah berjalan optimal sehingga program dan kegiatan selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah.	-
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	Koordinasi perencanaan dilaksanakan secara terstruktur dan berkesinambungan sehingga perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan terintegrasi, selaras, dan mendukung pemerataan pembangunan wilayah.	-
2	Mendorong penguatan inovasi daerah untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang inovatif dan partisipatif	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Pertumbuhan Inovasi Daerah	100,94%	Adanya penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, meningkatnya partisipasi aparatur dan pemangku kepentingan, serta adanya fasilitasi dan pendampingan inovasi secara berkelanjutan sehingga mendorong terciptanya inovasi yang relevan dan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik.	-
			Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kelitbangan	100%	Pelayanan kelitbangan yang diberikan sudah memenuhi harapan masyarakat baik dari sisi kualitas, maupun manfaat bagi penyelenggaraan pemerintah serta mendukung pelayanan publik	-
			Capaian Indeks Inovasi Daerah	106,77%		
			Persentase Kajian Penelitian dan Pengembangan yang dilaksanakan	100%		

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN	SOLUSI
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Presentasi Fasilitas Penelitian Bidang Sosial dan Kependudukan	100%	1. Dukungan kegiatan di bidang sosial dan kependudukan terlaksana sesuai target. 2. Hasil kegiatan membantu pemerintah memahami kondisi nyata masyarakat.	-
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase fasilitas penelitian bidang ekonomi dan pembangunan	100%	1. Hasil penelitian memberikan gambaran kondisi ekonomi dan pembangunan daerah yang jelas. 2. Dukungan terhadap penelitian ekonomi dan pembangunan sudah efektif dan memberi manfaat bagi daerah.	-
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang didiseminasikan	100%	1. Hasil kelitbangan memberikan kontribusi nyata bagi kualitas perencanaan pembangunan daerah. 2. Fungsi penelitian dan pengembangan berjalan lengkap, mulai dari penyusunan kajian sampai pemanfaatannya.	-

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian kinerja Bappeda Kabupaten Gresik beserta solusi mulai dari sasaran renstra, program, kegiatan sampai sub kegiatan yang terdiri dari 2 sasaran, 4 program, 15 kegiatan dan 32 sub kegiatan. Pelaksanaan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029 secara umum menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik. Keselarasan perencanaan pembangunan daerah didukung oleh koordinasi lintas perangkat daerah yang efektif, keterpaduan dokumen perencanaan dengan RPJMD, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang konsisten. Beberapa capaian belum optimal akibat penyesuaian kebijakan, perbedaan jadwal penyusunan dokumen, keterbatasan data pendukung, serta kendala teknis sistem informasi. Sementara itu, penguatan inovasi daerah dan pelaksanaan kelitbangan berjalan optimal dan berkontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Selanjutnya analisis efektifitas penggunaan sumber daya pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik dapat ditinjau pada Tabel 3.16 dan Tabel 3.17 sebagai berikut:

Tabel 3.16
Analisis Efektifitas Penggunaan Sumber Daya
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Gresik Renstra Tahun 2021-2026

NO	SASARAN RENSTRA	INSIKATOR KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	% CAPAIAN	
1	Menghadirkan keselarasan perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	100%	15.716.570.316,00	14.236.217.341,12	90,58%	9,42%
2	Mendorong Penguatan Inovasi Daerah untuk Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Inovatif dan Partisipatif	20,29%	20,48%	100,94%	2.690.302.780,00	1.946.956.066,00	72,37%	27,63%

Tabel 3.17
Efektifitas Penggunaan Sumber Daya
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Gresik Renstra Tahun 2025-2029

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
1	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	80,50	80,50	100%	15.716.570.316,00	14.236.217.341,12	90,58%	9,42%
2	Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	54,71	57,98	100%	2.690.302.780,00	1.946.956.066,00	72,37%	27,63%

Berdasarkan kedua tabel di atas, efektivitas penggunaan sumber daya Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik menunjukkan capaian yang konsisten antara periode 2021–2026 dan sasaran 2025–2029. Pada Renstra 2021–2026, sasaran Menghadirkan Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah tercapai dengan realisasi PAPBD sebesar 90,58% dan tingkat efisiensinya sebesar 9,42%, sementara sasaran Mendorong Penguatan Inovasi Daerah untuk Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Inovatif dan Partisipatif tercatat 72,37 dengan tingkat efisiensinya sebesar 27,63%. Selaras dengan sasaran Renstra 2025–2029,

capaian Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar 90,58 dengan tingkat efisiensinya sebesar 9,42% dan Meningkatnya Peran Riset dan Inovasi dalam mendukung pembangunan daerah sebesar 72,37 dengan tingkat efisiensinya sebesar 27,63%, menunjukkan bahwa pemanfaatan anggaran telah diarahkan secara efektif untuk mendukung prioritas perencanaan dan inovasi daerah, meskipun penguatan inovasi masih perlu ditingkatkan untuk mencapai potensi optimal.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Gresik melaksanakan 2 Urusan Pemerintahan Pada Urusan Penunjang meliputi Urusan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan. Pada Urusan Perencanaan dilaksanakan melalui 3 program terdiri 12 kegiatan dan 28 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 15.716.570.316,00 realisasi sebesar Rp. 14.236.217.341,12 atau 9.42% tidak terserap sebesar Rp. 1.480.352.974,8 disebabkan karena efisiensi. Pada Urusan Penelitian dan Pengembangan Melalui 1 Program, 3 Kegiatan dan 4 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 2.690.302.780,00 realisasi sebesar Rp.1.946.956.066,00 atau 27.63% atau tidak terserap sebesar Rp 743.346.714,00. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.18 sebagai berikut :